

**ANALISIS RASIO KEUANGAN
SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
PADAPEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh
Isti Fara Ida
STIE Putra Bangsa Kebumen
istifaraida18@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to determine the financial performance of the provincial government of Central Java. This research is quantitative descriptive. The data used are secondary data in the form of Budget Realization Report of Central Java Provincial Government in 2012-2016 at BPKAD Central Java Provincial Government. Data collection techniques used documentation techniques and literature study. Data analysis used is the analysis of independence ratio, effectiveness, efficiency, DSCR (Debt Service Coverage Ratio) and growth ratio. The results of this study indicate that the financial performance of the provincial government of Central Java for 2012-2016 need to be concerned is on the aspect of financial independence. Central Java provincial government financial independence in meeting the needs of funds for the implementation of government activities, development and community services is still very low. For the level of effectiveness and financial efficiency has shown positive results. The ratio of repayment capacity of Central Java provincial government is good enough. While financial growth both in terms of revenue, operational expenditure and capital expenditure still tend to fluctuate. This shows that the ability and performance of Central Java Provincial Government is still not optimal so that it needs harder work in financial management.

Keywords: Autonomy, financial performance, ratio analysis

A. PENDAHULUAN

Reformasi keuangan daerah telah memberi angin segar kepada pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat karena disadari bahwa yang memahami kondisi dan persoalan suatu daerah adalah (pemerintah) daerah itu sendiri. Kesempatan untuk menjadi daerah yang mandiri pun terbuka lebar seiring diberlakukannya otonomi daerah. Namun, hal ini juga menjadi tantangan bagi daerah yang bersangkutan. Setiap daerah harus siap menghadapi tantangan kemajuan NKRI dalam era globalisasi dengan segala keterbatasan dalam akuntansi keuangan daerahnya.

Terselenggaranya *good governance* (kepemerintahan yang baik) merupakan salah satu syarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapaitujuan dan cita-cita bangsa dan negara. *Good governance* merupakan tata kelola sebuah organisasi secara baik dan sesuai dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi. Perwujudan pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, pemerintah pada era sekarang dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Usaha reformasi keuangan Negara mencakup: Peraturan Perundang-undangan, kelembagaan, sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib dan taat pada peraturan yang berlaku secara efektif, efisien, transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan Pemda dalam

membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja keuangan dengan cara membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja keuangan harus mampu menjadi bukti bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Transparansi keuangan diharapkan dapat dilakukan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawabannya sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan sehingga masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang peranan penting dalam pembangunan dapat memantau kinerja pemerintah berjalan dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dan segenap lembaga pengelola keuangan yang bernaung di bawahnya dalam mengelola keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengukur kinerja keuangan pada pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan keuangan yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel. Penelitian terdahulu tentang rasio keuangan yang cenderung berbasis pada lingkup kabupaten dan kota menjadi salah satu ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian berbasis provinsi. Analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio *Debt Service Coverage Ratio*, dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur efektivitas dan realisasi serta tanggung jawab lembaga pengelola keuangan, dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan

good governance sehingga kinerja dari lembaga pengelola keuangan pemerintah yang bersangkutan diharapkan akan semakin mudah dinilai baik oleh kalangan tertentu maupun oleh masyarakat luas. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang akan menjadi objek penelitian ini adalah “Bagaimana penilaian kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan analisis rasio keuangan?”

C. BATASAN MASALAH

Penilaian kinerja keuangan mempunyai cakupan yang sangat luas dari periode ke periode selanjutnya sehingga penulis membatasi obyek penelitian yaitu laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2012-2016. Supaya pembahasan tidak menyimpang dari judul yang telah ditentukan, maka ruang lingkup dari pembahasan ini dibatasi pada analisis rasio keuangan yang digunakan. Penelitian ini dibatasi pada rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio *Debt Service Coverage Ratio*, dan rasio pertumbuhan.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diukur dari analisis rasio keuangan.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai cara menganalisis penelitian kinerja keuangan melalui rasio keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari penelitian.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Diharapkan menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Analisis Rasio Keuangan

Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menganalisa laporan keuangan adalah analisis rasio. Analisis adalah kemampuan dalam menguraikan masalah menjadi komponen yang lebih kecil sehingga mudah dipahami. Rasio adalah satu angka dibandingkan dengan angka yang lain sebagai suatu hubungan. Laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas. Sehingga analisis rasio keuangan (Halim, 2008: 231) adalah usaha mengidentifikasi dan menguraikan ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia menggunakan perhitungan-perhitungan atas data kuantitatif yang ditujukan dalam neraca maupun laba rugi.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode dibandingkan dengan periodesebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2008: 232). Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana

posisi rasio keuangan pemerintah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Wahyuni: 5).

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini menurut Halim (2008:232) adalah:

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Bentuk dari analisis rasio keuangan adalah analisis aset, yang dapat diartikan (Pramono, 2014:91):

1. Membandingkan nilai tiap-tiap pos asset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (dua periode pelaporan)
2. Menghitung proporsi dan persentase masing-masing kelompok asset dengan total asset
3. Menghitung modal kerja (*working capital*) yang dimiliki pemerintah daerah
4. Menghitung rasio keuangan terkait dengan asset
5. Mengevaluasi hasil perhitungan, interpretasi, dan prediksi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

1. Rasio Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Nurhayati, 2015: 57). Semakin tinggi rasio keuangan mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern, terutama pemerintah daerah/provinsi semakin rendah dan demikian pula

sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Pramono, 2014:104).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Menurut Pramono (2014: 105) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu disandingkan dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemda dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen (Pramono, 2014: 106).

3. Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, menurut Halim (2008:238), selain menggunakan PAD, pemda dapat menggunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah:

Ketentuan yang menyangkut persyaratan pinjaman

- a) Jumlah kumulatif pinjaman yang wajib dibayar maksimal 75 persen dari penerimaan PAD tahun sebelumnya
- b) *Debt service coverage ratio* (DSCR) minimal 2,5

$$DSCR = \frac{PAD + BD + DAU - BW}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

Dimana BD adalah Bagian Daerah, DAU adalah Dana Alokasi Umum dan BW adalah Belanja Wajib yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Halim, 2008: 241) mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian.

a. Realisasi Penerimaan PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

b. Rasio Pertumbuhan Belanja

1) Belanja Operasi

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi } X_n - \text{Realisasi Belanja Operasi } X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Operasi } X_{n-1}} \times 100\%$$

2) Belanja Modal

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } X_n - \text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_n = Tahun yang dihitung

X_{n1} = Tahun sebelumnya

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ulum (2012:10) dalam Puspitasari (2013:4), “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non finansial.”Selanjutnya menurut Halim (2004:24) dalam Puspitasari (2013:4) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Penilaian kinerja (Pramono, 2014:93) adalah proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif suatu objek, perkara dan keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan. Penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan (Nogi, 2003: 108 dalam Pramono, 2014: 93). Secara umum menurut Ulum (2004: 277) dalam Pramono (2014: 93), tujuan penilaian kinerja adalah:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya
- c. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Pada dasarnya menurut Mardiasmo (2004: 121) dalam Pramono (2014: 93) penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- b. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan

- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan (Pramono, 2014:88) adalah gambaran neraca/laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu. Laporan keuangan ini diperlukan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan biasa dibuat oleh perusahaan pada akhir periode. Laporan keuangan dapat dibuat secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Menurut Yusuf dalam Puspitasari (2013:31), “Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran”.

Secara spesifik, menurut Bastian (2010:297) tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.

5. Menyediakan informasi serta keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dan menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan (Tanjung, 2009:10).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan (Tanjung, 2009:11) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki meliputi:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 (Pramono, 2014:89) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)

4. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu anggaran daerah (Halim, 2004: 16 dalam Pramono, 2014: 98). Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wahyuni: 2) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek dalam satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dari

sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Bentuk APBD terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 (Pramono, 2014: 99) adalah:

1. Pendapatan, yang dibagi menjadi tiga kategori:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah
 - 2) Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja Negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pinjaman, ekuitas dana cadangan, asset, dan sisa anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 dalam Riadi (2015) menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan
2. Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Unsur-unsur anggaran pendapatan dan belanja daerah (Abdul Halim, 2004:16) dalam Pramono (2014:98) yaitu:

1. Rencana kegiatan suatu daerah dan uraian secara rinci
2. Terdapat sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya dan aktifitas serta biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka

G. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Tengah yang diambil dari BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan dan dokumen-dokumen yang berada di perusahaan, buku-buku kepustakaan, literatur, dan sumber lain.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan selama penelitian, penulis melakukan berbagai cara agar data atau informasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya antara lain:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengadakan pencatatan data atau bahkan lainnya yang diperoleh dari catatan atau dokumen untuk menganalisis masalah dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Dalam mengolah data dan menganalisis hasil penelitian, alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sebagai pedoman dalam melihat pola kemandirian keuangan dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0%– 25%
Rendah	25% – 50%
Sedang	50%– 75%
Tinggi	75%– 100%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 dalam Pramono, (2014:105)

- b) Menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan, dapat dilihat dengan tabel di bawah ini:

Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas (%)
Sangat Efektifitas	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	<60

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 dalam Pramono, (2014:106)

Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
Tidak Efisien	100% ke atas
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 dalam Pramono, (2014:107)

H. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman.

Tahun	PAD	Transfer
2012	Rp 6.629.308.010.656	Rp 5.029.375.234.223
2013	Rp 8.212.800.640.888	Rp 5.104.915.622.408
2014	Rp 9.916.358.231.432	Rp 5.210.592.932.680
2015	Rp 10.904.825.812.504	Rp 5.887.668.528.087
2016	Rp 11.541.029.720.310	Rp 8.017.297.595.983

Rasio kemandirian keuangan pada pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

$$1. \text{ Tahun 2012} = \frac{\text{Rp } 6.629.308.010.656}{\text{Rp } 5.029.375.234.223} \times 100\% = 13,18\%$$

$$2. \text{ Tahun 2013} = \frac{\text{Rp } 8.212.800.640.888}{\text{Rp } 5.104.915.622.408} \times 100\% = 16,09\%$$

$$3. \text{ Tahun 2014} = \frac{\text{Rp } 9.916.358.231.432}{\text{Rp } 5.210.592.932.680} \times 100\% = 19,03\%$$

$$4. \text{ Tahun 2015} = \frac{\text{Rp } 10.904.825.812.504}{\text{Rp } 5.210.592.932.680} \times 100\% = 18,52\%$$

$$5. \text{ Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 11.541.029.720.310}{\text{Rp } 8.017.297.595.983} \times 100\% = 14,40\%$$

Hasil dari perhitungan kemandirian penerimaan PAD tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 pada pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan menggunakan tabel berikut ini:

Tahun	PAD	Transfer	Rasio	Kemandirian
2012	Rp 6.629.308.010.656	Rp 5.029.375.234.223	13,18%	Rendah Sekali
2013	Rp 8.212.800.640.888	Rp 5.104.915.622.408	16,09%	Rendah Sekali
2014	Rp 9.916.358.231.432	Rp 5.210.592.932.680	19,03%	Rendah Sekali
2015	Rp 10.904.825.812.504	Rp 5.887.668.528.087	18,52%	Rendah Sekali
2016	Rp 11.541.029.720.310	Rp 8.017.297.595.983	14,40%	Rendah Sekali

Dari hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintah provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 13,18%, tahun 2013 naik 2,91% menjadi 16,09%, tahun 2014 naik sebesar 2,94% menjadi 19,03%, tahun 2015 turun sebesar 0,51% menjadi 18,52% dan pada tahun 2016 turun sebesar 4,12% menjadi 14,40%. Penurunan tingkat rasio kemandirian keuangan pada tahun 2015 terjadi karena adanya kenaikan jumlah PAD yang diterima pemerintah dimana pada tahun 2014 jumlah dana PAD yang diterima adalah sebesar Rp 9.916.358.231.432 menjadi Rp 10.904.825.812.504 pada tahun 2015. Peningkatan penerimaan dana PAD yang cukup signifikan tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah dana transfer yang diterima pemerintah yakni di tahun 2014 sebesar Rp 5.210.592.932.680 dan pada tahun 2015 sebesar Rp 5.887.668.528.087 sehingga terjadi penurunan tingkat kemandirian keuangan. Hal ini juga terjadi pada tahun 2016 dimana perbandingan penerimaan PAD dari tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan tidak berbanding lurus dengan jumlah transfer yang diterima pemerintah. Penurunan tingkat rasio keuangan tersebut diakibatkan pemerintah yang telah menerima dana transfer cukup besar dibandingkan

tahun sebelum-sebelumnya yakni sebesar Rp8.017.297.595.983 atau naik sebesar Rp 2.129.629.067.896 dari tahun 2015. Namun secara keseluruhan, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, pemerintah provinsi Jawa Tengah dilihat dari rasio kemandirian masih sangat rendah sekali. Hal itu terlihat dari besarnya transfer yang diperoleh selama satu periode keuangan.

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD yang direncanakan dengan target penerimaan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah. Sementara rasio efisiensi dapat dihitung dengan cara membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan PAD.

Tahun	Realisasi	Target	Biaya
2012	Rp 6.629.308.010.656	Rp 6.289.094.295.000	Rp 507.735.960.463
2013	Rp 8.212.800.640.888	Rp 7.413.086.681.000	Rp 1.070.226.471.526
2014	Rp 9.916.358.231.432	Rp 9.097.476.269.000	Rp 1.617.438.284.603
2015	Rp 10.904.825.812.504	Rp 12.068.029.759.000	Rp 1.409.436.791.747
2016	Rp 11.541.029.720.310	Rp 12.767.548.923.000	Rp 367.920.564.252

Rasio efektivitas keuangan pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$1. \text{ Tahun 2012} = \frac{\text{Rp } 6.629.308.010.656}{\text{Rp } 6.289.094.295.000} \times 100\% = 105,41\%$$

$$2. \text{ Tahun 2013} = \frac{\text{Rp } 8.212.800.640.888}{\text{Rp } 7.413.086.681.000} \times 100\% = 110,79\%$$

$$3. \text{ Tahun 2014} = \frac{\text{Rp } 9.916.358.231.432}{\text{Rp } 9.097.476.269.000} \times 100\% = 109,00\%$$

$$4. \text{ Tahun 2015} = \frac{\text{Rp } 10.904.825.812.504}{\text{Rp } 12.068.029.759.000} \times 100\% = 90,36\%$$

$$5. \text{ Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 11.541.029.720.310}{\text{Rp } 12.767.548.923.000} \times 100\% = 90,39\%$$

Hasil dari perhitungan efektivitas penerimaan PAD tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 pada pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan menggunakan tabel berikut ini:

Tahun	Realisasi	Target	Rasio	Efektifitas
2012	Rp 6.629.308.010.656	Rp 6.289.094.295.000	105,41%	Sangat Efektif
2013	Rp 8.212.800.640.888	Rp 7.413.086.681.000	110,79%	Sangat Efektif
2014	Rp 9.916.358.231.432	Rp 9.097.476.269.000	109,00%	Sangat Efektif
2015	Rp 10.904.825.812.504	Rp 12.068.029.759.000	90,36%	Efektif
2016	Rp 11.541.029.720.310	Rp 12.767.548.923.000	90,39%	Efektif

Berdasarkan pada tabel IV.5 dapat dilihat tingkat efektivitas keuangan pada pemerintah provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami naik dan turun. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas sebesar 105,41% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. Tahun 2013 pemerintah menaikkan target PAD yang harus dicapai menjadi Rp 7.413.086.861.000 dengan persentase efektivitas sebesar 110,79% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas dari penerimaan PAD juga masuk dalam kriteria sangat efektif namun mengalami penurunan sebesar 1,79% menjadi sebesar 109,10%. Pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan realisasi penerimaan PAD dari target yang telah ditentukan di tahun 2015 adalah Rp 12.068.029.759.000 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp 10.904.825.812.504. Pada tahun 2016 target PAD yang ditentukan sebesar Rp 12.767.548.923.000 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 11.541.029.720.310. Selisih yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan menyebabkan penurunan tingkat efektifitas pada tahun 2015 yakni sebesar 18,64% dari tahun 2014 atau sebesar 90,36% tingkat persentase efektivitasnya. Namun pada tahun 2016 persentase efektifitas keuangan pemerintah provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan kembali sebesar 0,03% dari tahun 2015. Penurunan tingkat rasio keefektifan terjadi pada tahun 2015 dan 2016 dimana kriteria keefektifan yang semula sangat efektif menjadi efektif. Hal itu disebabkan

pada tahun tersebut pemerintah provinsi Jawa Tengah mencanangkan program pembangunan infrastruktur dimana program tersebut nantinya akan menyerap banyak dana dari pemerintah. Peningkatan target penerimaan PAD yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya diharapkan mampu menutup pembiayaan pembangunan yang diprogramkan pemerintah.

Rasio efisiensi keuangan pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1. Tahun 2012 $= \frac{\text{Rp } 507.735.960.463}{\text{Rp } 6.629.308.010.656} \times 100\% = 7,66\%$
2. Tahun 2013 $= \frac{\text{Rp } 1.070.226.471.526}{\text{Rp } 8.212.800.640.888} \times 100\% = 13,03\%$
3. Tahun 2014 $= \frac{\text{Rp } 1.617.438.284.603}{\text{Rp } 9.916.358.231.432} \times 100\% = 16,31\%$
4. Tahun 2015 $= \frac{\text{Rp } 1.409.436.791.747}{\text{Rp } 10.904.825.812.504} \times 100\% = 12,92\%$
5. Tahun 2016 $= \frac{\text{Rp } 367.920.564.252}{\text{Rp } 11.541.029.720.310} \times 100\% = 3,19\%$

Hasil dari perhitungan efisiensi penerimaan PAD tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 pada pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan menggunakan tabel berikut ini:

Tahun	Biaya	Realisasi	Rasio	Efisiensi
2012	Rp 507.735.960.463	Rp 6.629.308.010.656	7,66%	Sangat Efisien
2013	Rp 1.070.226.471.526	Rp 8.212.800.640.888	13,03%	Sangat Efisien
2014	Rp 1.617.438.284.603	Rp 9.916.358.231.432	16,31%	Sangat Efisien
2015	Rp 1.409.436.791.747	Rp 10.904.825.812.504	12,92%	Sangat Efisien
2016	Rp 367.920.564.252	Rp 11.541.029.720.310	3,19%	Sangat Efisien

Berdasarkan pada tabel IV.6 dapat dilihat tingkat efisiensi keuangan pada pemerintah provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami naik dan turun. Pada tahun 2012 tingkat efisiensi sebesar 7,66% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efisien. Tahun 2013 pemerintah menaikkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

PAD sebesar Rp 1.070.226.471.526 dengan persentase efisiensi sebesar 13,03% atau mengalami kenaikan sebesar 5,37% dari tahun 2012 yang berarti masuk dalam kriteria sangat efisien. Namun pada tahun 2015 tingkat efisien dari penerimaan PAD yang juga masuk dalam kriteria sangat efektif mengalami penurunan sebesar 3,39% dari tahun 2014 menjadi sebesar 12,92%. Penurunan tingkat efisiensi juga terjadi pada tahun 2016 dimana tingkat efisiensi keuangan turun sebesar 9,73% dari tahun 2015 menjadi sebesar 3,19% pada tahun 2016.

3. Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*)

Rasio DSCR merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Tahun	PAD	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum
2012	Rp 6.629.308.010.656	Rp 751.282.698.223	Rp 1.516.892.951.000
2013	Rp 8.212.800.640.888	Rp 714.432.749.973	Rp 1.670.859.369.000
2014	Rp 9.916.358.231.432	Rp 659.530.315.680	Rp 1.803.931.189.000
2015	Rp 10.904.825.812.504	Rp 569.741.071.740	Rp 1.629.429.283.000
2016	Rp 11.541.029.720.310	Rp 893.673.221.918	Rp 1.859.907.223.000

Tahun	Belanja Wajib	Pinjaman
2012	Rp 1.559.634.616.549	Rp 707.735.960.463
2013	Rp 1.741.664.777.416	Rp 1.306.017.471.526
2014	Rp 2.197.436.487.588	Rp 1.689.438.284.603
2015	Rp 2.480.896.195.020	Rp 1.689.436.791.747
2016	Rp 2.567.876.390.675	Rp 417.920.564.252

Rasio DSCR pada pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

$$\text{DSCR} = \frac{\text{PAD+DBH+DAU -BW}}{\text{Total (Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)}}$$

Hasil dari perhitungan DSCR tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 pada pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan menggunakan tabel berikut ini:

Tahun	Perhitungan	Rasio DSCR
2012	(6.629.308.010.656+751.282.698.223+1.516.892.951.000)- 1.559.634.616.549/707.735.960.463	15,01
2013	(8.212.800.640.888+714.432.749.973+1.670.859.369.000)- 1.741.664.777.416/1.306.017.471.526	6,78
2014	(9.916.358.231.432+659.530.315.680+1.803.931.189.000)- 2.197.436.487.588/1.689.438.284.603	6,03
2015	(10.904.825.812.504+569.741.071.740+1.629.429.283.000)- 2.480.896.195.020/1.689.436.791.747	6,29
2016	(11.541.029.720.310+893.673.221.918+1.859.907.223.000)- 2.567.876.390.675/417.920.564.252	28,06

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman pada pemerintah provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2016 sangat baik, dikarenakan rasio DSCR nya berada di atas 2,5. Pencapaian rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan rasio pengembalian pinjaman sebesar 28,06 dan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2014 dengan rasio 6,03. Tingkat rasio kemampuan kembali membayar pinjaman yang tinggi pada tahun 2016 terjadi akibat pinjaman yang diperoleh pemerintah provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 417.920.564.252.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.

Tahun	PAD	Belanja Operasional	Belanja Modal
2011	Rp 5.564.233.151.730	Rp 3.682.283.824.736	Rp 464.327.008.098
2012	Rp 6.629.308.010.656	Rp 6.668.617.754.864	Rp 611.274.310.145
2013	Rp 8.212.800.640.888	Rp 7.399.082.908.125	Rp 9.947.40.520.114
2014	Rp 9.916.358.231.432	Rp 7.582.259.400.854	Rp 1.570.679.410.770
2015	Rp 10.904.825.812.504	Rp 8.860.616.895.759	Rp 2.514.681.555.008
2016	Rp 11.541.029.720.310	Rp 10.344.688.141.303	Rp 2.815.678.180.450

Rasio pertumbuhan keuangan pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

a. Analisis Pertumbuhan PAD = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$

1. Tahun 2012 = $\frac{\text{Rp } 6.629.308.010.656 - \text{Rp } 5.564.233.151.730}{\text{Rp } 5.564.233.151.730} = 19,14\%$

2. Tahun 2013 = $\frac{\text{Rp } 8.212.800.640.888 - \text{Rp } 6.629.308.010.656}{\text{Rp } 6.629.308.010.656} = 23,89\%$

3. Tahun 2014 = $\frac{\text{Rp } 9.916.358.231.432 - \text{Rp } 8.212.800.640.888}{\text{Rp } 8.212.800.640.888} = 20,74\%$

4. Tahun 2015 = $\frac{\text{Rp } 10.904.825.812.504 - \text{Rp } 9.916.358.231.432}{\text{Rp } 9.916.358.231.432} = 9,97\%$

5. Tahun 2016 = $\frac{\text{Rp } 11.541.029.720.310 - \text{Rp } 10.904.825.812.504}{\text{Rp } 10.904.825.812.504} = 5,83\%$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dan mengalami naik turun dari tahun 2012-2016 yakni sebesar 19,14% (2012), 23,89% (2013), 20,74% (2014), 9,97% (2015), dan 5,83% (2016).

b. Analisis Belanja Operasional = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasional } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Operasional } X_{n-1}} \times 100\%$

1. Tahun 2012 = $\frac{\text{Rp } 6.668.617.754.864 - \text{Rp } 3.682.283.824.736}{\text{Rp } 3.682.283.824.736} \times 100\% = 81,10\%$
2. Tahun 2013 = $\frac{\text{Rp } 7.399.082.908.125 - \text{Rp } 6.668.617.754.864}{\text{Rp } 6.668.617.754.864} \times 100\% = 10,95\%$
3. Tahun 2014 = $\frac{\text{Rp } 7.582.259.400.854 - \text{Rp } 7.399.082.908.125}{\text{Rp } 7.399.082.908.125} \times 100\% = 2,48\%$
4. Tahun 2015 = $\frac{\text{Rp } 8.860.616.895.759 - \text{Rp } 7.582.259.400.854}{\text{Rp } 7.582.259.400.854} \times 100\% = 16,86\%$
5. Tahun 2016 = $\frac{\text{Rp } 10.344.688.141.303 - \text{Rp } 8.860.616.895.759}{\text{Rp } 8.860.616.895.759} \times 100\% = 16,75\%$

c. Analisis Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\%$

1. Tahun 2012 = $\frac{\text{Rp } 611.274.310.145 - \text{Rp } 464.327.008.098}{\text{Rp } 464.327.008.098} \times 100\% = 31,65\%$
2. Tahun 2013 = $\frac{\text{Rp } 994.740.520.114 - \text{Rp } 611.274.310.145}{\text{Rp } 611.274.310.145} \times 100\% = 62,72\%$
3. Tahun 2014 = $\frac{\text{Rp } 1.570.679.410.770 - \text{Rp } 994.740.520.114}{\text{Rp } 994.740.520.114} \times 100\% = 57,90\%$
4. Tahun 2015 = $\frac{\text{Rp } 2.514.681.555.008 - \text{Rp } 1.570.679.410.770}{\text{Rp } 1.570.679.410.770} \times 100\% = 60,10\%$
5. Tahun 2016 = $\frac{\text{Rp } 2.815.678.180.450 - \text{Rp } 2.514.681.555.008}{\text{Rp } 2.514.681.555.008} \times 100\% = 11,97\%$

Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan keuangan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 pada pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan menggunakan tabel berikut ini:

Tahun	Analisis Penerimaan PAD	Analisis Belanja Operasional	Analisis Belanja Modal
2012	19,14%	81,10%	31,65%
2013	23,89%	10,95%	62,72%
2014	20,74%	2,48%	57,90%
2015	9,97%	16,86%	60,10%
2016	5,83%	16,75%	11,97%

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan keuangan pemerintah provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Analisis penerimaan PAD mencapai tingkat pertumbuhan paling baik pada tahun 2013 dengan tingkat rasio sebesar 23,89%. Pencapaian tersebut diperoleh dari peningkatan penerimaan PAD yang cukup besar di tahun sebelumnya yakni dari Rp 6.629.308.010.656 menjadi Rp 8.212.800.640.888. Pencapaian pertumbuhan PAD paling rendah pada tahun 2016 yakni sebesar 5,83% terjadi akibat penerimaan PAD yang mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari tahun sebelumnya yakni dari Rp 10.904.825.812.504 menjadi Rp 11.541.029.720.310.

Analisis rasio belanja operasional pada pemerintah provinsi Jawa Tengah mencapai pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2012 yakni sebesar 81,10%. Pada tahun 2013-2016 pencapaian pertumbuhan keuangan mengalami penurunan yakni sebesar 10,95% (2013), 2,48% (2014), 16,86% (2015), dan sebesar 16,75% pada tahun 2016. Pencapaian terendah pada tahun 2014 diakibatkan oleh tingkat belanja operasional pada tahun 2014 yang cenderung tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 7.399.082.908.125 menjadi Rp 7.582.259.400.854.

Analisis rasio belanja modal pada pemerintah provinsi Jawa Tengah mencapai pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2013 yakni sebesar 62,72%. Selama tahun 2012-2016 pencapaian pertumbuhan keuangan mengalami penurunan yakni sebesar 31,65% (2012), 62,72% (2013), 57,90% (2014), 60,10% (2015) dan sebesar 11,97% pada tahun 2016. Pencapaian terendah pada tahun 2016 diakibatkan oleh tingkat belanja modal pada tahun 2016 yang cenderung tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 2.514.681.555.008 menjadi Rp 2.815.678.180.450.

I. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dan saran dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Rasio kemandirian keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 masih rendah sekali.
2. Rasio efektivitas keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2012-2014 sudah sangat efektif sementara di tahun 2015 dan 2016 baru masuk dalam kriteria efektif.
3. Rasio efisiensi keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 sudah sangat efisien.
4. Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (DSCR) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah sangat baik.
5. Rasiopertumbuhan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.

Saran

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebaiknya mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana ekstern atau bantuan dari pemerintah pusat dengan cara mengelola PAD secara spesifik agar potensi yang ada bisa dikelola dengan baik dan tepat sasaran sehingga pemerintah provinsi Jawa Tengah bisa dikatakan mandiri secara keuangan.
2. Pemerintah provinsi Jawa Tengah diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PADnya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari pemerintah pusat bisa semakin berkurang.
3. Pemerintah provinsi Jawa Tengah agar lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

J. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B., Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan I. @kademika: Jakarta
- Bastian, I., 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Eirlangga: Jakarta.
- Halim, A., 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, A., 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Natalia, L., dan T. D. Astuti. 2015. Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Sosio-Humaniora* 6 (1): 55-72.
- Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 4(1):55-66.
- Jateng, Pemprov. 2018. BPKAD Provinsi Jawa Tengah. <http://www.bpkad.jateng.pemprov>. 09 Februari 2018. (10:34).
- Pramono, J., 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Among Makarti* 7(13):83-112.
- PTUN. 2018. Sekilas Jawa Tengah. <http://www.ptun-semarang.go.id>. 26 Februari 2018 (09:56).
- Puspitasari, A. F., 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya* 1-22.
- Ratmono, D., dan M. Sholihin. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Riadi, M., 2015. Pengertian dan Fungsi APBD. <http://www.kajianpustaka.com>. 13 Oktober 2017 (16:48).

- Santosa, E., J.J. Tinangon., I. Elim. 2014. Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA* 2(3):1512-1521.
- Tanjung, A. H., 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Ketiga. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Wenny, C. D., 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP* 2(1):39-51.
- Wahyuni, N., Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI Malang* 1-18.